



PENJELASAN SUBSTANSI KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN (KORTEKRENBANG) TAHUN 2018

Disampaikan Oleh:

Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M.Si

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

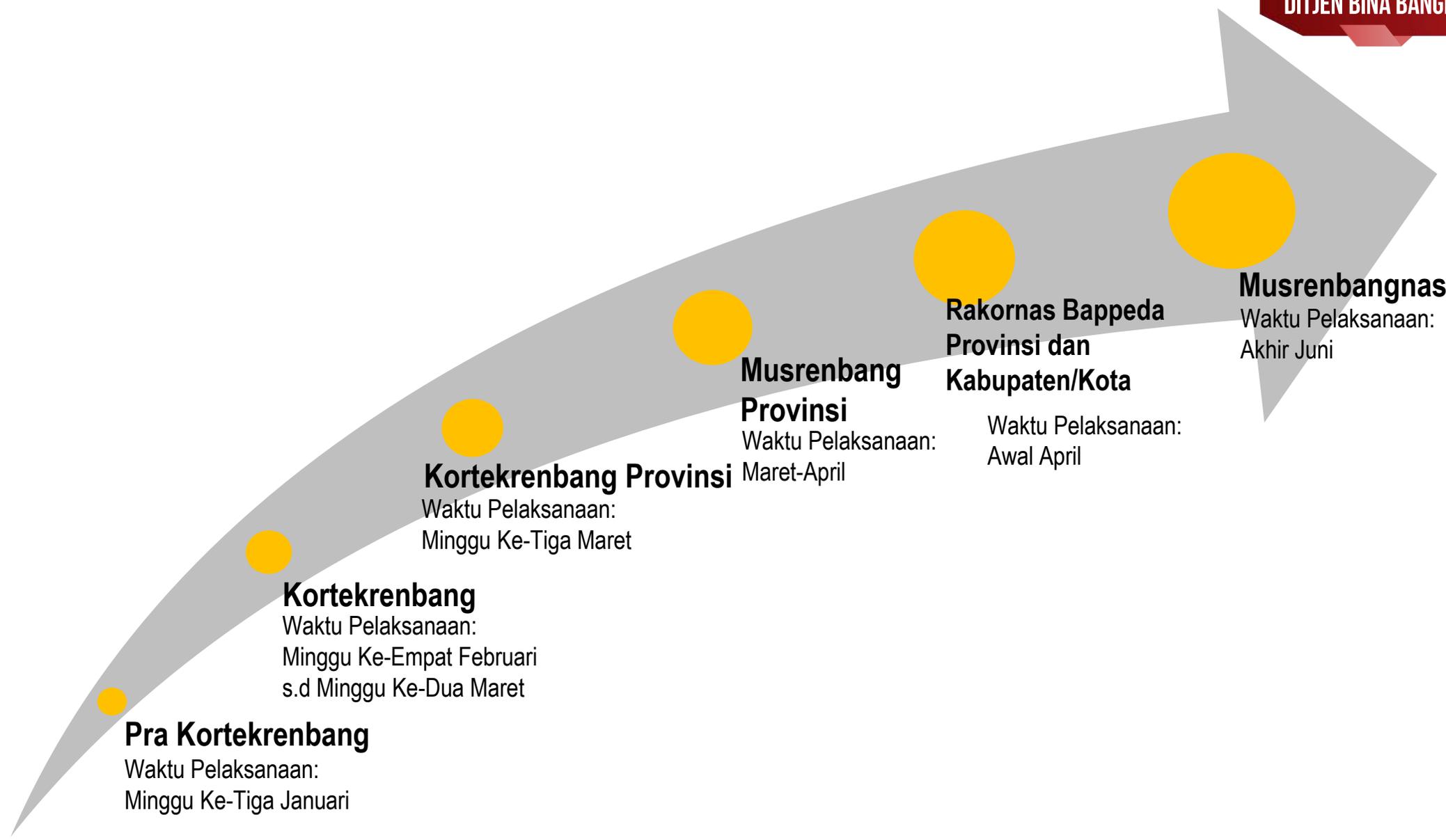


PENDAHULUAN

DITJEN BINA BANGDA



- a. Pencapaian target pembangunan nasional tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, namun juga bisa dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Dalam kerangka pencapaian tujuan tersebut, maka target pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
- b. UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah. Ayat 2 menyebutkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.





TUJUAN DAN KELUARAN

DITJEN BINA BANGDA



1. TUJUAN

- a. Sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah Tahun 2019.
- b. Penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi, dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota masing-masing bidang urusan pemerintahan Tahun 2019.

2. KELUARAN

- a. Kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk pencapaian target pembangunan nasional, sebagai masukan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Nasional. Bahan masukan penyusunan rancangan awal RKP 2019.
- b. Bahan masukan penyusunan rancangan awal RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota 2019.



PENYELENGGARAAN KORTEKRENBANG TAHUN 2018

DITJEN BINA BANGDA



• REGIONAL I

TEMPAT	CAKUPAN PROVINSI
YOGYAKARTA	<ol style="list-style-type: none">1. Aceh2. Sumatera Utara3. Sumatera Barat4. Riau5. Kepulauan Riau6. Jambi7. Bengkulu8. Sumatera Selatan9. Bangka Belitung10. Lampung11. DKI Jakarta12. Jawa Barat13. Banten14. Jawa Tengah15. DI Yogyakarta16. Jawa Timur17. Bali
TANGGAL	
26 Februari s.d. 2 Maret 2018	

• REGIONAL II

TEMPAT	CAKUPAN PROVINSI
MATARAM	<ol style="list-style-type: none">1. Nusa Tenggara Barat2. Nusa Tenggara Timur3. Kalimantan Barat4. Kalimantan Tengah5. Kalimantan Selatan6. Kalimantan Timur7. Kalimantan Utara8. Sulawesi Utara9. Sulawesi Barat10. Sulawesi Tengah11. Sulawesi Tenggara12. Sulawesi Selatan13. Gorontalo14. Maluku15. Maluku Utara16. Papua Barat17. Papua
TANGGAL	
5 s.d 9 Maret 2018	



PESERTA KORTEKRENBANG

DITJEN BINA BANGDA



- PESERTA PUSAT
 - Kemendagri;
 - Bappenas; dan
 - Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- PESERTA DAERAH
 - Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari:
 - Sekretaris Daerah
 - Bappeda
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan



RINCIAN JADWAL



NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
I. Senin, 26 Februari 2018 dan 5 Maret 2018			
1.	12.00 - 16.00	Registrasi Peserta	
2.	19.00 - 22.00	Malam Ramah Tamah	Sekda Prox DI Yogyakarta
II. Selasa, 27 Februari 2018 dan 6 Maret 2018			
1.	08.00-09.00	Registrasi Peserta	
2.	09.00-11.00	Pembukaan:	
		1. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
		2. Laporan Ketua Panitia	Dirjen Bina Bangda
		3. Ucapan Selamat Datang dari Gubernur	Gubernur DI Yogyakarta
		4. <i>Keynote Speech</i> "Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2019"	Menteri PPN/Kepala Bappenas
		5. Sambutan Menteri Dalam Negeri sekaligus membuka acara secara resmi	Menteri Dalam Negeri
6. Doa			
3.	11.00-11.15	COFFEE BREAK	
4.	11.15-13.00	Paparan Panel	
		1. Kebijakan Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2019 dan Penjabarannya di Daerah	Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas
		2. Kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2019	Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kemenkeu
3.	13.00-13.30	Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pembangunan Nasional dan Daerah	Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri
5.	13.00-13.30	Penjelasan Teknis tentang Rakortek Pembangunan Nasional Antara K/L dan Daerah	1. Direktur PEIPD, Ditjen Bina Bangda 2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas

6.	13.30-15.00	ISOMA	
7.	15.00-18.00	Pembahasan dan Klarifikasi Desk dalam Kolomok I, II, III dan IV	1. Direktur SUPD I 2. Direktur SUPD II 3. Direktur SUPD III 4. Direktur SUPD IV

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
8.	18.00 - 19.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan:	5. Direktur Otda, Bappenas 6. Direktur PWK, Bappenas
		1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
		2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional	
		3. Target Nasional per Urusan	
4. Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK			
9.	19.00-22.00	ISOMA	
9.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan:	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
		1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,	
		2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,	
		3. Target Nasional per Urusan	
4. Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK			
III. Rabu, 28 Februari 2018 dan 7 Maret 2018			
1.	08.30-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan:	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
		1. Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,	
		2. Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,	
3. Target Nasional per Urusan			
4. Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK			
2.	12.00-13.00	ISOMA	



RINCIAN JADWAL

DITJEN BINA BANGDA



NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
2.	12.00-13.00	ISOMA	
3.	13.00-17.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
4.	17.00 - 19.00	ISOMA	
5.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
		2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	
IV. Kamis, 1 Maret 2018 dan 8 Maret 2018			
1.	08.30-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
2.	12.00-13.00	ISOMA	
3.	13.00-17.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
4.	17.00 - 19.00	ISOMA	

5.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
----	-------------	---	---

NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
		2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	

IV. Kamis, 1 Maret 2018 dan 8 Maret 2018

1.	08.30-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
----	-------------	--	---

2.	12.00-13.00	ISOMA	
----	-------------	--------------	--

3.	13.00-17.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
----	-------------	---	---

4.	17.00 - 19.00	ISOMA	
----	---------------	--------------	--

5.	19.00-22.00	Lanjutan Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
----	-------------	---	---

V. Jumat, 2 Maret 2018 dan 9 Maret 2018			
1.	09.00-12.00	Pembahasan/Verifikasi Usulan Kegiatan: 1. <u>Proyek K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 2. <u>Proyek Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional,</u> 3. <u>Target Nasional per Urusan.</u> 4. <u>Penandatanganan BA hasil pembahasan per-K/LNK</u>	Kemendagri, Bappenas, K/L terkait dan Daerah (Perangkat Daerah terkait)
2.	12.00-13.00	ISOMA	
3.	13.00-13.30	Penutupan	

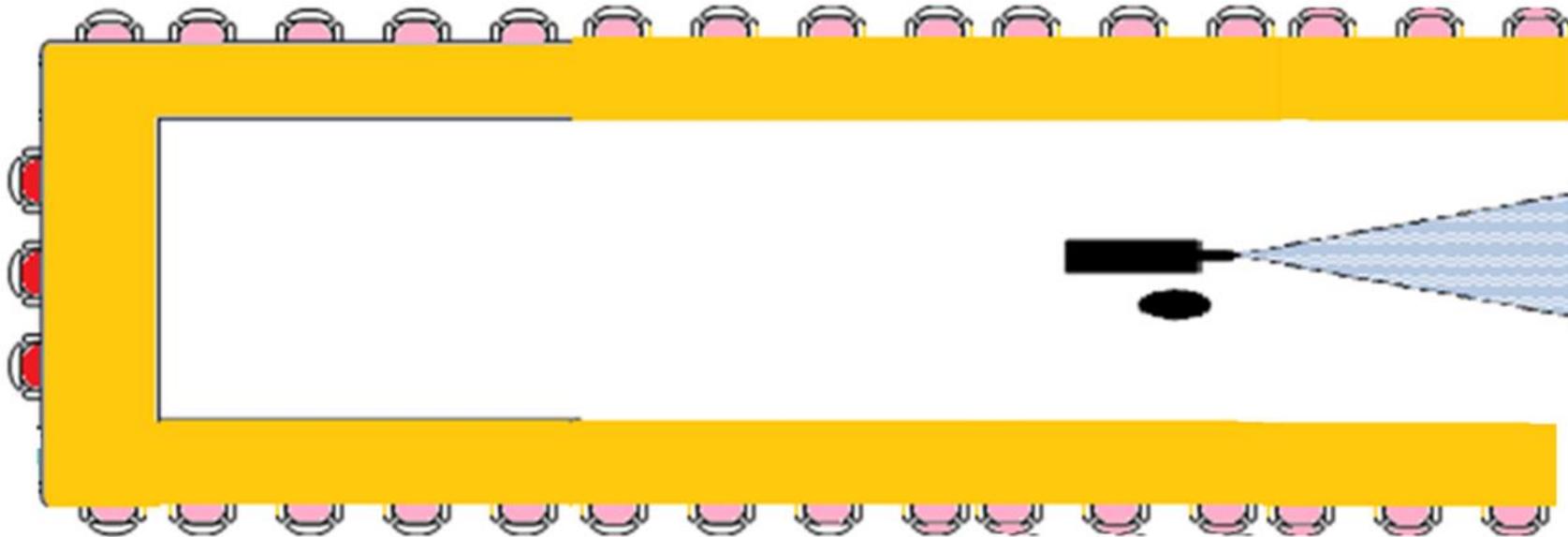
NO	WAKTU	AGENDA	NARASUMBER
		1. <u>Pembacaan Hasil Rakortek</u> 2. <u>Sambutan Penutupan</u>	Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Bappenas Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri

Catatan: Jadwal acara dapat berubah sewaktu-waktu



LAYOUT PEMBAHASAN

DITJEN BINA BANGDA



-  PESERTA RAKORTEK
-  NARASUMBER
-  MODERATOR/NOTULEN



SUBSTANSI PEMBAHASAN

DITJEN BINA BANGDA



Pembahasan dalam Koordinasi Teknis Perencanaan Pusat dan Daerah meliputi urutan pembahasan sebagai berikut:

1. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh K/L;
2. Pembahasan Prioritas Nasional yang akan dilakukan oleh Daerah; dan
3. Pembahasan Proyek Daerah (usulan kegiatan) yang akan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Catatan:

- Pembahasan akan diutamakan pada pembahasan Prioritas Nasional di tiap daerah terlebih dahulu (Poin 1) dilanjutkan dengan (Poin 2).
- Untuk daerah yang tidak menjadi lokasi pelaksanaan prioritas nasional, maka pembahasan dilakukan terkait usulan kegiatan daerah (proyek daerah) kepada pemerintah pusat atau pembahasan mengenai kebijakan arahan pusat kepada daerah (top down policy direction).



PEMBAGIAN TUGAS DALAM DESK

DITJEN BINA BANGDA



Kemendagri

Mengarahkan dan mengatur jalannya Diskusi terkait: 1) Time Management; 2) Analisa Cakupan Pembahasan (Ketersediaan dan masukan data Proyek dalam setiap Topik Pembahasan); 3) Substansi Pembahasan (Pembahasan detail Proyek by Proyek dan/atau Pembahasan Umum/Pokok-Pokok Kebijakan Proyek)

Kementerian/Lembaga

Memberikan masukan substansi atas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang diusulkan Daerah

Bappenas

Sebagai Mitra K/L, memberikan masukan substansi atas Proyek K/L dan Proyek Daerah yang menjadi Prioritas Nasional

Pemerintah Daerah

Memberikan masukan terkait: 1) Tingkat Kebutuhan dan Kesiapan Pelaksanaan Proyek K/L; 2) Proyek Daerah yang dibahas; 3) Lokasi dan target Proyek K/L

Notulen (Kemendagri dan Bappenas)

Mencatat Hasil Kesepakatan Rakortek



TINDAK LANJUT



Hasil dari KORTEK Perencanaan Pusat ini menjadi bahan dalam Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional, dengan rincian sebagai berikut:

- Bagi Pemerintah Pusat
 1. Penyempurnaan Program, Kegiatan, Proyek K/L, Lokasi dan Target dalam RKP.
 2. Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L.
 3. Menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.
- Bagi Pemerintah Daerah
 1. Penyempurnaan Program, kegiatan, proyek daerah, lokasi dan anggaran daerah pendukung pelaksanaan Prioritas Nasional dalam rancangan RKPD dan Renja PD.
 2. Menjadi dasar pembahasan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Provinsi.

FORMULIR BERITA ACARA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARA KEMENTERIAN/ LEMBAGA NON KEMENTERIAN DAN DAERAH

Pada Hari ini,, Tanggal, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Antara Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional dengan hasil sebagai berikut:

I. Daerah dan K/L

1. Provinsi:
2. Nama Perangkat Daerah/PD:
3. Kementerian/Lembaga:

II. Tim Pembahas dan Validasi

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.			Kementerian Dalam Negeri
2.			Bappenas
3.			Kementerian/LNK
4.			Daerah Prov

III. Menyepakati hasil pembahasan dan Klarifikasi adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan K/L yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
2. Program/kegiatan Daerah yang mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

IV. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan dan Klarifikasi:

1. Berdasarkan Berita Acara hasil **Kortek**, Kementerian/Lembaga Non Kementerian melakukan penyempurnaan program, kegiatan, lokasi dan anggaran Prioritas Nasional pada RKP dan Renja K/L;
2. Berdasarkan Berita Acara hasil **Kortek**, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan program, kegiatan, lokasi dan anggaran dalam mendukung Prioritas Nasional dan prioritas daerah dalam rancangan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
3. Hasil Kortek Perencanaan menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Nasional.
4. Hasil Kortek Perencanaan dijabarkan oleh provinsi dalam pelaksanaan Kortek Provinsi.
5. Hasil Kortek Provinsi yang diikuti oleh kabupaten/kota menjadi dasar pembahasan dalam Musrenbang Provinsi.

Demikian Berita Acara hasil Penyelarasan Utusan Pemerintahan dan Beban Kerja Perangkat Daerah ini dibuat 4 (empat) rangkap dan diandatangani oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian/L terkait, Pemerintah Provinsi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

+:

MENYETUJUI	
Perwakilan Kementerian / Lembaga, (.....) Jabatan:	Perwakilan Daerah Provinsi, (.....) Jabatan:
MENGETAHUI,	
Perwakilan Bappenas, (.....) Jabatan:	Perwakilan Kemendagri, (.....) Jabatan:



PENYELARASAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

DITJEN BINA BANGDA





Format yang diisi oleh Pusat

- a. Format 1 Program/Kegiatan K/L yang mendukung Prioritas Nasional (yang harus diisi oleh pusat adalah Format 1.A Indikasi Rancangan Awal Renja K/L); dan
- b. Format 4 Program/Kegiatan/Proyek K/L Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional Di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019 yang harus diisi oleh pusat adalah Format 4.A Indikasi Rancangan Awal Renja K/L



**Menggunakan Aplikasi
KRISNA Bappenas**

Format yang diisi oleh Daerah

- a. Format 1 Program/Kegiatan K/L Yang Mendukung Prioritas Nasional (yang harus diisi oleh daerah adalah Format 1.B Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);
- b. Format 2 Program/Kegiatan Provinsi Yang Mendukung Prioritas Nasional;
- c. Format 3 Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Yang Mendukung Prioritas Nasional;
- d. Format 4 Penyelarasan Proyek K/L Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019 (yang harus diisi oleh daerah adalah Format 4.B Usulan Daerah Untuk Rancangan Awal Renja K/L);
- e. Format 5 Penyelarasan Program/Kegiatan Provinsi Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional 2019; dan
- f. Format 6 Penyelarasan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Yang Mendukung Target Pembangunan Nasional di Luar Prioritas Nasional Tahun 2019.



**Menggunakan Aplikasi
SIMLARAS Bappenas**



FORMAT 1 PROGRAM/KEGIATAN K/L YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

DITJEN BINA BANGDA



Data Rencana Awal Renja KL (APBN)
(Aplikasi KRISNA)

K/L:

A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	LOKASI		KET
							PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L

No.	PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	USULAN TARGET*	USULAN LOKASI		KET
							PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)

Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat
(Aplikasi SIMLARAS)



FORMAT 2 PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG Mendukung PRIORITYAS NASIONAL

DITJEN BINA BANGDA



PROVINSI:

URUSAN :

No.	PRIORITYAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITYAS, KEGIATAN PRIORITYAS	PROYEK PRIORITYAS NASIONAL	KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									



Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)



Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)



FORMAT 3 PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG Mendukung PRIORITYAS NASIONAL

DITJEN BINA BANGDA



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

URUSAN :

No.	PRIORITYAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITYAS, KEGIATAN PRIORITYAS	PROYEK PRIORITYAS NASIONAL	KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									



Referensi PN, PP, KP, ProPN
(Aplikasi KRISNA)



Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)



FORMAT 4 PENYELARASAN PROYEK K/L YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL)

DITJEN BINA BANGDA



URUSAN:
K/L:

Data Rencana Awal Renja KL (APBN)
(Aplikasi KRISNA)

A) INDIKASI RANCANGAN AWAL RENJA K/L

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	LOKASI		KET
	Indikator RPJMN	Target 2019					PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									

B) USULAN DAERAH UNTUK RANCANGAN AWAL RENJA K/L

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		USULAN OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	USULAN TARGET*	USULAN LOKASI		KET
	Indikator RPJMN	Target 2019					PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									



Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN
(Aplikasi SIMLARAS)



Data Usulan Daerah ke K/L – Kewenangan Pusat
(Aplikasi SIMLARAS)



FORMAT 5 PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN PROVINSI YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL)

DITJEN BINA BANGDA



PROVINSI:

URUSAN/BIDANG:

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/ TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
	Indikator RPJMN	Target 2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
.. Dst									



Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN
(Aplikasi SIMLARAS)



Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Provinsi - APBD)
(Aplikasi SIMLARAS)



FORMAT 6 PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN KABUPATEN/KOTA YANG MENDUKUNG TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL (DILUAR PRIORITAS NASIONAL)

DITJEN BINA BANGDA



PROVINSI/KABUPATEN/KOTA:

URUSAN/BIDANG:

NO	TARGET NASIONAL (SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019)		KEGIATAN (PROYEK) DAERAH	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH	OUTPUT/TARGET	PAGU (APBD) (RUPIAH)	LOKASI	KETERANGAN
	Indikator RPJMN	Target 2019							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						4			
2									
Dst									



Referensi Target Pembangunan Nasional RPJMN (Aplikasi SIMLARAS)



Data Program/Kegiatan Daerah (Kewenangan Kab/Kota - APBD) (Aplikasi SIMLARAS)



TERIMAKASIH